

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga salah satu negara di bagian tenggara Benua Asia. Dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia, terdapat berbagai macam kesenian, budaya, tradisi, adat istiadat, kekayaan alam, dan keanekaragaman hayati yang menjadi keunikan dan ciri khas tersendiri bagi masing-masing daerahnya. Dengan adanya keberagaman yang dimiliki, tentunya dapat menjadi modal bagi tiap-tiap daerah untuk memanfaatkan keberagaman tersebut sebagai sumber daya yang dapat dikembangkan dalam sektor pariwisata. Pengembangan keanekaragaman sumber daya tersebut dalam sektor pariwisata tentunya dapat menarik wisatawan agar tertarik untuk mengunjunginya sehingga dapat mendukung perekonomian dari masyarakat setempat.

Menurut Gamal (2004: 3), Berpariwisata mengacu pada tindakan suatu individu atau sekelompok orang yang sementara meninggalkan kediamannya untuk berkunjung ke lokasi lain di luar wilayah rumah mereka. Motivasi perjalanan dapat bervariasi, mencakup berbagai aspek kesehatan, agama, politik, sosial budaya ekonomi, kesehatan dan lainnya seperti rasa ingin tahu, merasakan pengalaman baru, dan bertujuan untuk pembelajaran. (Tjitrawati et al., 2022)

Tujuan dari kegiatan pariwisata adalah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, melestarikan lingkungan dan alam, memelihara kebudayaan, meningkatkan citra dari bangsa, menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, menjadi identitas yang memperkuat kesatuan bangsa, serta mempererat hubungan antar negara. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peluang kerja dan pendapatan di daerah tujuan wisata.

Selain merupakan negara kepulauan, Indonesia juga terdiri dari hamparan lautan yang sangat luas daripada bagian daratannya. Dengan adanya kondisi tersebut, menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan alam berupa dikelilingi oleh garis pantai yang membentang luas sehingga memunculkan ekosistem daerah pesisir pantai. Wilayah pesisir pantai yang tidak hanya menyimpan keindahan alam tetapi juga terdapat banyak jenis flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari penduduk setempat di sekitar pantai. Banyaknya sumber daya yang tersedia di wilayah pesisir pantai juga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian.

Salah satu pemanfaatan kekayaan alam di daerah pesisir selain memanfaatkannya untuk kebutuhan masyarakat adalah dengan mengembangkannya sebagai sebuah objek wisata yang berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung. Pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah pesisir ini dapat

diwujudkan dalam suatu agenda yang dapat diupayakan untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Selain menyuguhkan keindahan alam, objek wisata di daerah pesisir juga menyimpan berbagai macam flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan menjadi daya tarik wisata untuk memikat berbagai wisatawan. Menurut Nurisyah (2001), perencanaan pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir perlu disusun secara menyeluruh dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dalam ekosistem pulau, dan diintegrasikan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Pengelolaan ini harus dapat diselaraskan dengan situasi sosial dan budaya lokal serta ekologi wilayah pesisir yang mengedepankan sinergitas daerah tersebut dan daerah sekitarnya. (Wahyuni et al., 2017)

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan pesisir pantai di bagian utaranya. Luasnya kawasan pesisir pantai ini mendukung lahirnya berbagai objek wisata yang mengusung tema pariwisata bahari. Dengan munculnya berbagai objek wisata tersebut akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rembang. Tentunya, hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang. Berdasarkan data yang peneliti temukan, akumulasi kunjungan dari wisatawan di Kabupaten Rembang menempati peringkat ke delapan bersama dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Tingginya kunjungan wisatawan di Kabupaten Rembang melonjak pada tahun 2022 yang merupakan masa setelah adanya pandemi Covid-

19. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam sektor pariwisata.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Wisatawan Menurut Kabupaten/Kota (2022)

No.	Kab/Kota	2020		2021		2022		JUMLAH
		Nus	Man	Nus	Man	Nus	Man	
1	Klaten	1.152.773	22.205	1.627.714	463	4.755.621	60.461	7.619.237
2	Semarang Kab	3.260.303	6.628	2.670.281	77	57.792	41	5.995.122
3	Temanggung	223.765	40	254.969	0	5.338.233	4.918	5.821.925
4	Banyumas	1.325.727	79	1.498.236	0	2.626.837	0	5.450.879
5	Magelang Kab	1.412.666	37.681	862.955	902	2.525.421	67.754	4.907.379
6	Tegal Kab	427.389	137	431.523	0	3.810.236	622	4.669.907
7	Semarang Kota	1.840.813	856	1.285.370	217	1.241.210	0	4.368.466
8	Rembang	854.093	11	871.136	0	2.249.573	6	3.974.819
9	Banjarnegara	936.517	887	1.167.841	0	1.748.969	0	3.854.214
10	Purbalingga	1.376.265	50	1.061.332	0	1.037.984	85	3.475.716
11	Demak	545.815	42	858.372	3	1.575.708	4	2.979.944
12	Kudus	491.488	0	660.692	0	1.732.989	11	2.885.180
13	Jepara	343.896	3.004	286.808	50	1.780.857	5.048	2.419.663
14	Wonosobo	1.169.403	126	1.052.729	0	172.295	0	2.394.553
15	Tegal Kota	425.953	0	496.532	0	1.224.107	0	2.146.592
16	Kebumen	70.929	0	582.337	2	1.461.767	12	2.115.047
17	Purworejo	483.589	123	268.248	0	1.331.076	0	2.083.036
18	Batang	679.117	0	569.562	0	822.099	0	2.070.778
19	Pemalang	698.421	0	682.907	0	533.389	0	1.914.717
20	Karanganyar	883.123	867	25.867	0	986.729	1.548	1.898.134
21	Cilacap	3.075	0	742.396	0	887.091	0	1.632.562
22	Kendal	433.376	59	415.996	0	773.829	10	1.623.270
23	Magelang Kota	40.323	3.726	331.354	5	1.014.232	3.171	1.392.811
24	Pati	510.361	11	42.616	6	721.893	93	1.274.980
25	Sragen	71.981	236	41.318	5	1.075.960	0	1.189.500
26	Surakarta	353.902	1.333	378.484	63	236.052	0	969.834
27	Grobogan	203.928	0	175.767	0	526.195	0	905.890
28	Blora	162.451	0	223.702	0	498.162	2	884.317
29	Boyolali	117.631	0	129.443	0	443.053	183	690.310
30	Pekalongan Kota	42.254	189	184.569	0	458.304	0	685.316
31	Pekalongan Kab	31.104	0	479.286	0	95.052	23	605.465
32	Brebes	317.271	0	226.216	0	8.029	648	552.164
33	Wonogiri	64.702	0	51.541	0	258.353	49	374.645
34	Sukoharjo	65.114	0	33.174	0	143.013	2	241.303
35	Salatiga	23.938	0	44.789	0	86.547	0	155.274
	JUMLAH	21.043.456	78.290	20.716.062	1.793	44.238.657	144.691	86.222.949

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, 2022 & Diolah oleh peneliti.

Salah satu objek wisata di Kabupaten Rembang yang mengoptimalkan kawasan pesisir pantai sebagai daya tariknya adalah Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi merupakan kawasan hutan *mangrove* di Desa Pasar Banggi yang kemudian dikembangkan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagai pariwisata. Pemanfaatan ini

tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian.

Sesuai dengan namanya, ekowisata ini terletak di Desa Pasar Banggi dan mulai dikembangkan pada tahun 2013 melalui inisiatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang bekerja sama dengan kelompok setempat yang bertanggung jawab memelihara hutan *mangrove* di sana, yaitu Kelompok Tani Sido Dadi Maju. Ekosistem hutan *mangrove* di kawasan ekowisata ini tumbuh dan berkembang baik, sehingga menjadi daya tarik para wisatawan yang datang untuk mengunjunginya. Fasilitas menarik lainnya meliputi jembatan yang melintang hingga ke arah laut, gazebo yang cocok untuk beristirahat dan berfoto, serta berbagai jenis burung, menambah pesona Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi sebagai destinasi wisata alam. Pada tahun 2016, kunjungan mencapai 16.129 wisatawan, jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan di tahun 2017 menjadi 69.040 wisatawan. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan kunjungan wisatawan, dengan total jumlah wisatawan yang berkunjung hanya mencapai 9.919 orang, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019, mencapai 53.315 wisatawan. (Lailiyah & Sanjoto, 2021)

Sudah bertahun-tahun semenjak perintisan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi, masih ditemukan adanya kekurangan dalam pengembangannya. Salah satunya jarak menuju lokasi yang cenderung jauh dan tak jarang membuat beberapa wisatawan merasa malas untuk berjalan menuju lokasi Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Selain itu, lokasi yang cenderung lembab dan kurangnya perawatan pada beberapa bagian di sepanjang jembatan menyebabkan

adanya pengeroposan jembatan yang memang terbuat dari bahan kayu. Akibatnya, hal ini berdampak pada ditutupnya satu jalur jembatan yang mengarah ke bagian barat.

Sebagai suatu kawasan wisata produktif serta berpotensi dalam peningkatan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat, keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menjadi krusial dalam rangka melakukan klasifikasi, pengawasan, hingga bimbingan kepada masyarakat terkait pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Dengan adanya pengembangan yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan dorongan pada peningkatan ekonomi, keterampilan, dan objek wisata yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain berfungsi sebagai pendukung dan promotor produk pariwisata, sektor pariwisata juga memiliki peran vital sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduk setempat.

Namun, akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pariwisata di kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi menjadi lumpuh. Hal ini berdampak pula terhadap penurunan jumlah wisatawan yang menyebabkan para pelaku usaha di sekitar lokasi banyak mengalami penurunan omset yang cukup banyak. Selain itu, pihak pengelola juga sempat mengadakan wahana permainan kayuh bebek dan perahu ke Pulau Swalan yang berseberangan dengan lokasi Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Namun, sekarang wahana tersebut sudah tidak ada lagi karena menurunnya jumlah kunjungan dari wisatawan. Meskipun sudah beberapa tahun berlalu setelah adanya pandemi Covid-19, jumlah wisatawan di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi masih lebih rendah

dibandingkan dengan objek wisata lainnya di Kabupaten Rembang. Daya tarik wisata yang cenderung monoton, menyebabkan beberapa wisatawan merasa kurang puas dengan atraksi Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Tabel 1. 2 Jumlah Pengunjung Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi (2021-2023)

2021	Jumlah Pengunjung	2022	Jumlah Pengunjung	2023	Jumlah Pengunjung
Januari	2.179	Januari	8.212	Januari	5.378
Februari	1.525	Februari	3.050	Februari	2.023
Maret	3.504	Maret	3.495	Maret	1.385
April	6.546	April	838	April	3.827
Mei	10.548	Mei	12.690	Mei	3.597
Juni	-	Juni	5.470	Juni	4.327
Juli	-	Juli	4.173	Juli	4.125
Agustus	-	Agustus	2.595	Agustus	1.969
September	4.108	September	2.996	September	2.388
Oktober	7.068	Oktober	3.151	Oktober	2.369
November	3.083	November	2.379	November	1.875
Desember	5.494	Desember	4.304	Desember	4.452
Jumlah	44.055	Jumlah	53.353	Jumlah	37.715

Sumber: Data olahan peneliti, 2023.

Dengan keberadaan sumber daya alam yang masih alami dan keanekaragaman satwa serta jenis mangrove di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi, prospek ekowisata di sana diharapkan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha di sektor pariwisata. Hal tersebut memiliki peluang untuk peningkatan ekonomi dan memberdayakan masyarakat lokal di sekitarnya. Terutama dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah telah diberikan kewenangannya masing-masing untuk merencanakan

pembangunan di daerahnya tanpa melibatkan proses birokrasi yang rumit menuju pemerintah pusat.

Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang idealnya juga memiliki kewenangan untuk mengurus segala urusan daerah termasuk di sektor pariwisata. Dalam hal ini, kewenangan yang dimaksud berupa menggali dan mengembangkan lebih jauh potensi pariwisata di wilayahnya. Begitu juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Rembang yang berusaha mengembangkan berbagai potensi dari kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan: a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota; b) menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota; c) menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/ kota; d) menerbitkan Perizinan Berusaha; e) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di wilayahnya; f) memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya; g) memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru; h) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i) memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya; j) Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

Berdasarkan temuan peneliti, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi masih belum optimal. Salah satunya dalam mempromosikan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana strategi yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Rembang melalui media sosial. Promosi melalui media sosial merupakan hal yang potensial untuk dilakukan di masa sekarang karena dapat menjangkau pengguna yang lebih luas daripada menggunakan metode promosi yang masih konvensional. Oleh karena itu, promosi di media sosial tentu harus memerlukan strategi yang tepat untuk menarik perhatian pengguna media sosial.

Peneliti menemukan data dari berbagai akun media sosial resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, pemasaran daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Rembang sudah dilakukan tetapi belum mendapat jangkauan yang luas. Kurang luasnya jangkauan pemasaran di media sosial yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dilatarbelakangi dengan jumlah pengikut yang tidak banyak seperti di akun *Instagram* dan *X* (sebelumnya bernama *Twitter*).



Gambar 1. 1 Akun *Instagram* dan *X* Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Sumber: Peneliti, 2023.

Selain sedikitnya jumlah pengikut, publikasi rutin melalui media sosial juga dapat menjadi bentuk keaktifan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan promosi melalui media sosial. Promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang hanya berupa publikasi rutin melalui akun *Instagram* saja. Sedangkan di akun lain seperti *X* dan halaman di *Facebook* sudah tidak ada unggahan terbaru. Masing-masing unggahan terakhir pada bulan September 2023 dan Oktober 2022.



Gambar 1. 2 Unggahan Terakhir di Akun X dan Halaman *Facebook* Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Sumber: Peneliti, 2023.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: “(i) pemerintah kabupaten/kota berwenang memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya”. Demikian pula dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memelihara daya tarik wisata yang masih terletak di wilayah Kabupaten Rembang termasuk Ekowisata *Mangrove Park* Pasar Banggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Peneliti menemukan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi kurang memperhatikan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur yang ada di sana. Hal ini terlihat pada kondisi beberapa fasilitas dan bangunan jembatan yang mengalami kerusakan. Seperti kursi yang rusak, jembatan yang kayunya sudah rapuh dan berlubang, fasilitas spot foto yang rusak, dan lain sebagainya.



Gambar 1. 3 Area Jembatan Ditutup karena Kayunya Rapat



Gambar 1. 4 Beberapa Bagian Jembatan Berlubang



Gambar 1. 5 Karpas di Salah Satu Spot Foto Rusak dan Kotor



Gambar 1. 6 Kursi dari Kayu yang Hanya Tersisa Penyangganya

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023.

Kerusakan beberapa fasilitas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para wisatawan. Sehingga dapat berimbas pada menurunnya kunjungan wisatawan. Sebaliknya, fasilitas yang terawat akan memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan sehingga akan lebih berlama-lama di kawasan wisata. Hal tersebut juga dapat memberikan peluang bagi wisatawan untuk berkunjung kembali.

Di sisi lain, letak Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi yang berada di daerah pesisir pantai dan tanah berlumpur, membuat kawasan ini kaya akan hasil laut yang dapat dimanfaatkan sebagai olahan untuk dijual. Beberapa diantaranya adalah kepiting *mangrove*, udang, kerang, tiram, hingga ikan bandeng. Kekayaan hasil laut di kawasan Ekowisata *Mangrove Park* ini tentu dapat menjadi peluang

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun, peneliti menemukan bahwa olahan yang dibuat oleh masyarakat sekitar masih menggunakan metode-metode yang sederhana dan cenderung kurang menarik. Pengolahan hasil laut hanya sebatas dijadikan sebagai hidangan siap santap tanpa atau dengan kemasan yang sederhana. Sehingga hal ini menyebabkan olahan khas Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi kurang diminati oleh wisatawan.



Gambar 1. 7 Olahan Hasil Laut di Kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi

Sumber: *Website Jembatan Merah*, 2020.

Dalam hal ini diperlukan adanya keterlibatan aktif dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai organisasi publik yang juga membawahi urusan terkait ekonomi kreatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana melakukan inovasi tentang cara memanfaatkan hasil laut tersebut sebagai suatu potensi sumber daya pariwisata dalam bentuk ekonomi kreatif dengan melibatkan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbup Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 19 poin (i) Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas untuk melaksanakan

pelatihan, bimbingan teknis, hingga pendampingan sumber daya pariwisata serta ekonomi kreatif. Dengan demikian, dibutuhkan adanya realisasi berdasarkan poin di peraturan tersebut dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang melalui Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu untuk memberikan perhatian terhadap berbagai potensi ekonomi kreatif yang ada di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Berdasarkan penggambaran situasi serta kondisi dari permasalahan dan berbagai temuan peneliti yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ditemukan adalah:

- a. Belum optimalnya peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam melakukan promosi pariwisata khususnya untuk Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.
- b. Kurangnya peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam memelihara infrastruktur di kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

- c. Belum adanya peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam melakukan pengembangan ekonomi kreatif di kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dan temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan administrasi publik, terkhusus dalam peningkatan peran dari pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan bahwa hasil dan temuan dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan peneliti terkait dengan pelaksanaan pengembangan ekowisata di wilayah penelitian.

b. Bagi Universitas

Diharapkan bahwa hasil dan temuan dari penelitian ini dapat menambah daftar koleksi ilmiah berupa penelitian baru yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk berbagai penelitian ilmiah berikutnya dengan mengangkat topik yang berkaitan.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

Diharapkan bahwa hasil dan temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dengan tujuan meningkatkan peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan bahwa hasil dan temuan dari penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan yang berguna bagi masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti melihat penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik peneliti sebagai bahan referensi dan perbandingan sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1.	Mahcica Julita & Nur Lila Meilani/2023/ Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi	Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, khususnya dalam menangani kasus	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori peran (<i>role theory</i>) Bidle And Thomas (Sarwono 2015) dimana ada 5 dimensi peran, yaitu: 1) peran sebagai suatu kebijakan;	Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi belum mencapai dimensi peran secara menyeluruh sesuai dengan teori yang digunakan, yang	Fokus dan instansi penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti, menitikberatkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan

		kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut.	2) peran sebagai strategi; 3) peran sebagai alat komunikasi; 4) peran sebagai alat penyelesaian sengketa; 5) peran sebagai terapi.	mencakup peran sebagai kebijakan, alat komunikasi, dan terapi. Kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meliputi keterbatasan fasilitas dan anggaran.	penekanan pada kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut.
2.	Denny David Nagaring, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow/2021/ Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Manado.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dari Ndraha (Hum 2010:36) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: fungsi primer atau fungsi pelayanan fungsi dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Manado telah menerapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan anak terlantar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kasus anak terlantar bahkan mencapai nol di Kota Manado.	Perbedaan utama penelitian terletak pada fokus pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, khususnya dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.	Moch Yusron Ulul Azmi/2022/ Peran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan Masa Pandemi Covid-19 di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Lamongan Tahun 2020	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan masa pandemi Covid-19 di pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dari Biddle & Thomas yang menerangkan perihal teori peran sebagai suatu rangkaian rumusan yang menentukan tindakan yang diinginkan dari seorang pemegang kedudukan (Sarlito, 2015). Di dalam teori peran terdapat lima indikator yang keseluruhannya saling terkait, antara lain (Biddle, B. B., & Thomas, 1982): 1) harapan; 2) norma; 3) wujud perilaku; 4) evaluasi; dan 5) sanksi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan telah efektif dalam memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Berbagai bentuk bantuan dan program-program untuk mendukung ekonomi masyarakat nelayan telah dilaksanakan dengan baik, dan upaya ini dianggap berhasil dalam mencapai peningkatan perekonomian masyarakat.	Dalam penelitian ini, fokus ditujukan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, dengan penekanan pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Lamongan selama pandemi Covid-19 tahun 2020.
----	---	---	--	---	--

4.	Nurma Sari dan Komalasari/2021/ Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kota Pekanbaru	Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah dalam pembinaan UKM menghadapi perubahan tersebut.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut (Auliya & Arif, 2021; Diva, 2009; Nirwana, Muhammadiyah, & Hasanuddin, 2017) yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal dapat diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah memainkan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam membina Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menghadapi Revolusi Industri 4.0. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rendahnya mindset pelaku UKM, dan kurangnya informasi terkait kegiatan pembinaan yang dilakukan.	Penelitian ini memfokuskan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, dengan perhatian khusus pada pembinaan Usaha Kecil dan Menengah menghadapi perubahan Revolusi Industri 4.0 di Kota Pekanbaru.
5.	Dwijayanty Ogelang, Ismail Rachman, Fanley N. Pangemanan/2021/ Peran Dinas	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata Daerah dalam	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Fokus penelitian terletak pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya pada

	Pariwisata Daerah dalam Mengelola Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe	mengelola sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe.	Penelitian ini menggunakan teori dari Middleton (dalam Yoeti 2012:4) yaitu pengembangan amenities yang meliputi aspek-aspek: Akses Destinasi Wisata, Fasilitas Destinasi Wisata, dan Daya Tarik Wisata. Penelitian ini juga menggunakan tiga peran pemerintah dalam mengelola pariwisata yaitu pemerintah sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator.	belum berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Meskipun sektor pariwisata di kabupaten tersebut memiliki daya tarik, fasilitas dan akses perlu ditingkatkan untuk mencapai potensi maksimal.	pengelolaan sektor pariwisata di wilayah tersebut.
6.	Fiona Long dan Joshua Evans/2023/ <i>“Doing What We Can with What We Have”</i> : Examining the role of local government in poverty management	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mentransformasi sistem pengentasan	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori <i>governmentality</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengatasi tunawisma selama pandemi Covid-19. Mereka	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini

	<i>during the COVID-19 pandemic</i>	kemiskinan dengan cara mengurangi marginalisasi perkotaan dalam rangka pengentasan tunawisma selama pandemi Covid-19 dan mengevaluasi dampak yang terjadi.	<i>approach</i> yang menekankan pada peran pemerintah dalam mengatur masyarakat sesuai dengan kekuasaan atau kedudukan yang dimiliki oleh pemerintah.	bertanggung jawab untuk mendanai program dan mengkoordinasikan layanan bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal.	lokus atau instansi yang diteliti yaitu Pemerintah Kota Bristol, Inggris dan Pemerintah Kota Edmonton, Kanada. Sedangkan fokus permasalahannya adalah pengentasan tunawisma selama pandemi Covid-19 melalui pengurangan marginalisasi perkotaan.
7.	<p>7. Maria Cucciniello dkk./2022/<i>The role of organizational capacity to foster digital transformation in local governments: The case of three European smart cities</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kapabilitas organisasi dalam proses transformasi digital dan mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam keberhasilan transformasi digital.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dari Kolar Bryan (2011), yang mengkategorikan kapasitas organisasi melalui infrastruktur, manajemen, pengetahuan dan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas organisasi sangat penting untuk keberhasilan transformasi digital di pemerintah daerah.</p> <p>1. Manajemen: Memiliki strategi transformasi digital yang jelas, kepemimpinan yang efektif, dan unit-unit</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini lokus atau instansi yang diteliti yaitu Pemerintah Kota Barcelona, Milan, dan Munich. Sedangkan fokus</p>

			<p>pembelajaran, serta kolaborasi.</p>	<p>yang berdedikasi di pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendorong transformasi digital.</p> <p>2. Kolaborasi: Kolaborasi lintas sektor, kemitraan publik-swasta, kolaborasi dengan masyarakat, dan kolaborasi dengan tingkat pemerintahan lainnya memainkan peran penting dalam keberhasilan inisiatif transformasi digital.</p> <p>3. Sumber Daya: Meskipun memiliki sumber daya yang memadai adalah hal yang penting, pengelolaan sumber daya yang efektif juga sama pentingnya untuk keberhasilan implementasi transformasi digital.</p>	<p>permasalahannya adalah proses transformasi digital dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam keberhasilan transformasi digital.</p>
--	--	--	--	---	--

				4. Faktor Kontekstual: Karakteristik dan prioritas spesifik masing-masing pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan eksternal dan faktor lingkungan, mempengaruhi pendekatan transformasi digital dan kapasitas organisasi yang diperlukan.	
8.	Joakim Kulin dan Ingemar Johansson Sevä/2019/ <i>The Role of Government in Protecting the Environment: Quality of Government and the Translation of Normative Views about Government Responsibility into Spending Preferences</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pandangan normatif individu terhadap peran pemerintah dalam melindungi lingkungan dan meningkatkan anggaran pemerintah untuk kebijakan lingkungan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang memiliki perspektif dan konsep yang berhubungan dengan peran pemerintah, kepercayaan pada instansi pemerintah serta sikap yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas instansi pemerintah dalam perannya menangani masalah lingkungan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk memaksimalkan anggaran dalam upaya menjaga lingkungan. Sehingga jika pemerintah dapat memaksimalkan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini lokus atau instansi yang diteliti yaitu pemerintah daerah di berbagai negara seperti Chili, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia,

			diambil dalam kebijakan lingkungan.	perannya dalam usaha menjaga lingkungan, maka masyarakat akan menilai bahwa instansi pemerintah memiliki kualitas yang tinggi.	Perancis, Jerman, Hungaria, Islandia, Israel, Jepang, Latvia, Lithuania, Selandia Baru, Norwegia, Filipina, Slovakia, Slovenia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Switzerland, Taiwan, Thailand, Inggris, dan Amerika. Sedangkan fokus permasalahannya adalah hubungan antara pandangan normatif individu terhadap peran pemerintah dalam melindungi lingkungan dan meningkatkan anggaran pemerintah untuk kebijakan lingkungan.
9.	Suwan Li, dkk./2023/ <i>Multi-Agent Evolutionary Game Strategy for</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi

	<i>Ecotourism Development in National Parks: A Case Study of Wuyishan National Park</i>	pengkoordinasian kepentingan pemerintah, penyedia wisata, dan pengunjung wisata untuk mencapai hubungan yang saling menguntungkan.	Penelitian ini menggunakan teori <i>stakeholders</i> yang berfokus pada individu atau suatu kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi peran para <i>stakeholders</i> dalam pengembangan destinasi wisata.	penting dalam mengembangkan ekowisata di taman nasional. Pemerintah harus mengenalkan hukum yang relevan, peraturan-peraturan, dan sistem manajemen untuk menguatkan hubungan antar <i>stakeholders</i> dan menyediakan dukungan berupa subsidi finansial serta mempromosikan pengembangan ekowisata.	yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini lokus atau instansi yang diteliti yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Fujian, China. Sedangkan fokus permasalahannya adalah mekanisme pengkoordinasian kepentingan pemerintah, penyedia wisata, dan pengunjung wisata untuk mencapai hubungan yang saling menguntungkan.
10.	Kenneth Apiah, dkk./2019/ <i>The Role of Government and the international competitiveness of SMEs: Evidence from Ghanaian Non-Traditional Exports</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran pemerintah dan Export Promotion Agencies (EPA)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori hubungan antara pemerintah dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam memfasilitasi kegiatan ekspor UMKM namun belum optimal karena adanya masalah dalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini

		dalam mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan ekspor di sektor UMKM.	dengan agen pemerintah yang berfokus pada peran mereka dalam meningkatkan UMKM di bidang ekspor.	penghematan anggaran. Selain itu ditemukan pula adanya koordinasi yang kurang optimal dengan EPA sehingga membatasi kegiatan ekspor yang berlangsung.	lokus atau instansi yang diteliti yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Fujian, China. Sedangkan fokus permasalahannya adalah peran pemerintah dalam memberikan bantuan promosi dan fasilitasi ekspor di sektor UMKM.
--	--	---	--	---	--

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber jurnal.

Penelitian yang ditulis oleh Julita & Laila Meilani (2023), dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menangani tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi tersebut belum sepenuhnya memenuhi dimensi peran sesuai teori yang digunakan, terutama dalam kebijakan, alat komunikasi, dan terapi untuk penanganan kasus tersebut. Kendala utama melibatkan keterbatasan fasilitas dan anggaran. Fokus dan instansi penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti, menitikberatkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan penekanan pada kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Nagaring et al. (2021), dengan judul “Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)”. Penelitian ini bertujuan menyelidiki peran pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Kota Manado. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah menerapkan kebijakan untuk menangani permasalahan anak terlantar, dengan harapan kebijakan tersebut dapat mengubah statistik dan bahkan membawa Kota Manado ke angka nol untuk kasus Anak Terlantar. Perbedaan utama penelitian terletak pada fokus pada Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, khususnya dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penelitian yang ditulis oleh Yusron et al. (2022), dengan judul “Peran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan Masa Pandemi Covid-19 di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Lamongan Tahun 2020”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perikanan dalam mendukung perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Lamongan terbukti efektif. Upaya beragam, termasuk bantuan dan program-program, berhasil diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, pencapaian peningkatan perekonomian masyarakat dapat dianggap berhasil. Dalam penelitian ini, fokus ditujukan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, dengan penekanan pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Lamongan selama pandemi Covid-19 tahun 2020.

Penelitian yang ditulis oleh Sari & Komalasari (2021), dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peran Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pembinaan usaha tersebut menyikapi perubahan era industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Kota Pekanbaru,

terutama dalam fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator, telah dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan. Meskipun demikian, beberapa kendala muncul, seperti keterbatasan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rendahnya kesadaran pelaku Usaha Kecil Menengah, dan kurangnya informasi terkait program pembinaan. Penelitian ini memfokuskan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, dengan perhatian khusus pada pembinaan Usaha Kecil dan Menengah menghadapi perubahan Revolusi Industri 4.0 di Kota Pekanbaru.

Penelitian yang ditulis oleh Ogelang et al. (2021), dengan judul “Peran Dinas Pariwisata Daerah dalam Mengelola Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran Dinas Pariwisata Daerah dalam mengelola sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meskipun Dinas Pariwisata Daerah telah berusaha mengelola sektor pariwisata, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum mencapai potensi optimal. Fokus penelitian terletak pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya pada pengelolaan sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Long & Evans (2023), dengan judul “*Doing What We Can with What We Have*”: Examining the role of local government in poverty management during the COVID-19 pandemic”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mentransformasi sistem pengentasan kemiskinan dengan cara mengurangi marginalisasi perkotaan dalam rangka pengentasan tunawisma selama pandemi Covid-19 dan mengevaluasi

dampak yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengatasi tunawisma selama pandemi Covid-19. Mereka bertanggung jawab untuk mendanai program dan mengkoordinasikan layanan bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini lokus atau instansi yang diteliti yaitu Pemerintah Kota Bristol, Inggris dan Pemerintah Kota Edmonton, Kanada. Sedangkan fokus permasalahannya adalah pengentasan tunawisma selama pandemi Covid-19 melalui pengurangan marginalisasi perkotaan.

Penelitian yang ditulis oleh Gasco-Hernandez et al. (2022), dengan judul *“The role of organizational capacity to foster digital transformation in local governments: The case of three European smart cities”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kapabilitas organisasi dalam proses transformasi digital dan mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam keberhasilan transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas organisasi sangat penting untuk keberhasilan transformasi digital di pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini lokus atau instansi yang diteliti yaitu Pemerintah Kota Barcelona, Milan, dan Munich. Sedangkan fokus permasalahannya adalah proses transformasi digital dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam keberhasilan transformasi digital.

Penelitian yang ditulis oleh Kulin & Johansson Sevä (2019), dengan judul *“The Role of Government in Protecting the Environment: Quality of Government and the Translation of Normative Views about Government Responsibility into Spending Preferences”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengkoordinasian kepentingan pemerintah, penyedia wisata, dan pengunjung wisata untuk mencapai hubungan yang saling menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas instansi pemerintah dalam perannya menangani masalah lingkungan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk memaksimalkan anggaran dalam upaya menjaga lingkungan. Sehingga jika pemerintah dapat memaksimalkan perannya dalam usaha menjaga lingkungan, maka masyarakat akan menilai bahwa instansi pemerintah memiliki kualitas yang tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini lokus atau instansi yang diteliti yaitu pemerintah daerah di berbagai negara seperti Chili, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Hungaria, Islandia, Israel, Jepang, Latvia, Lithuania, Selandia Baru, Norwegia, Filipina, Slovakia, Slovenia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Switzerland, Taiwan, Thailand, Inggris, dan Amerika. Sedangkan fokus permasalahannya adalah hubungan antara pandangan normatif individu terhadap peran pemerintah dalam melindungi lingkungan dan meningkatkan anggaran pemerintah untuk kebijakan lingkungan.

Penelitian yang ditulis oleh Li et al. (2023) dengan judul *“Multi-Agent Evolutionary Game Strategy for Ecotourism Development in National Parks: A*

Case Study of Wuyishan National Park". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengkoordinasian kepentingan pemerintah, penyedia wisata, dan pengunjung wisata untuk mencapai hubungan yang saling menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengembangkan ekowisata di taman nasional. Pemerintah harus mengenakan hukum yang relevan, peraturan-peraturan, dan sistem manajemen untuk menguatkan hubungan antar stakeholders dan menyediakan dukungan berupa subsidi finansial serta mempromosikan pengembangan ekowisata. Pemerintah harus mengenakan hukum yang relevan, peraturan-peraturan, dan sistem manajemen untuk menguatkan hubungan antar stakeholders dan menyediakan dukungan berupa subsidi finansial serta mempromosikan pengembangan ekowisata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini lokus atau instansi yang diteliti yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Fujian, China. Sedangkan fokus permasalahannya adalah mekanisme pengkoordinasian kepentingan pemerintah, penyedia wisata, dan pengunjung wisata untuk mencapai hubungan yang saling menguntungkan.

Penelitian yang ditulis oleh Appiah et al. (2019), dengan judul "*The Role of Government and the international competitiveness of SMEs: Evidence from Ghanaian Non-Traditional Exports*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran pemerintah dan *Export Promotion Agencies* (EPA) dalam mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan ekspor di sektor UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam memfasilitasi kegiatan

ekspor UMKM namun belum optimal karena adanya masalah dalam penghematan anggaran. Selain itu ditemukan pula adanya koordinasi yang kurang optimal dengan EPA sehingga membatasi kegiatan ekspor yang berlangsung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokus atau instansi yang diteliti perannya dan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini lokus atau instansi yang diteliti yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Fujian, China. Sedangkan fokus permasalahannya adalah peran pemerintah dalam memberikan bantuan promosi dan fasilitasi ekspor di sektor UMKM.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah memiliki tema yang sama berkaitan dengan peran pemerintah. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan penelitian pada Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata *Mangrove Park*.

Dalam melakukan analisis, peneliti mengadopsi teori peran yang dikemukakan oleh Biddle & Thomas dalam Sarwono (2015: 224) yang dikutip oleh Hia (2019) yang menjelaskan teori peran sebagai suatu rangkaian formulasi yang mengidentifikasi tindakan yang diinginkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi, serta sejumlah indikator peran yang dijelaskan oleh Ife & Tesoriero (2008: 558-613) yang harus dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Dengan fokus yang telah disebutkan, penelitian ini merupakan suatu inisiatif baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga mengusung ide atau konsep yang muncul dengan perbedaan signifikan dari penelitian sebelumnya.

1.5.2 Administrasi Publik

Maksudi (2017) mengutip beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan administrasi.

- a. Stephen P. Robbins (1983), administrasi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara efisien melalui kolaborasi dengan individu lainnya untuk mencapai tujuan.
- b. Herbert A. Simon (1959: 3), administrasi adalah serangkaian kegiatan kelompok yang dilakukan secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu Frederickson (1997: 31-32), membedakan kata publik dengan berbagai perspektif yaitu: 1) publik sebagai kelompok kepentingan; 2) publik sebagai pemilih rasional; 3) publik sebagai pihak yang diwakili; 4) publik sebagai pelanggan; dan 5) publik sebagai warga negara.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan pertama-tama bahwa administrasi publik adalah suatu proses di mana tenaga kerja dan sumber daya lainnya (seperti modal, fasilitas, dan teknologi) diatur (organisasi), dikelola (fungsi manajemen) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, Administrasi Publik merupakan kombinasi seni dan ilmu. Sebagai seni (*art*), Administrasi Publik melibatkan keterampilan praktis dalam mengelola hubungan dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Sebagai ilmu (*science*), Administrasi Publik berusaha memecahkan masalah-masalah publik. (Maksudi, 2017)

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas mengenai administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian proses kerjasama yang rasional yang dilakukan oleh aparatur negara/pemerintah. Dalam konteks ini, sumber daya dan personel publik diatur dan dikoordinasikan untuk melaksanakan kebijakan yang mencerminkan tujuan negara serta memenuhi berbagai kebutuhan publik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Pergeseran paradigma administrasi negara sesuai dengan argumentasi Henry (1995: 21-49) dalam Keban (2014 : 31-33) terjadi sebanyak lima kali, tetapi baru-baru ini terdapat satu paradigma baru yaitu (Cahyani et al., 2021):

a. Paradigma dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)

Dalam paradigma ini, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White memainkan peran penting. Goodnow menekankan bahwa politik harus fokus pada pembuatan kebijakan, sementara administrasi bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut. Paradigma ini menuntut pemisahan antara badan legislatif yang mewakili kehendak rakyat dan badan eksekutif yang mengimplementasikan kebijakan. Badan yudikatif bekerja bersama badan legislatif dalam menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat. Administrasi berperan sebagai sistem netral, yang bertujuan mencapai efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintah. Fokus utama paradigma ini adalah pada *government bureaucracy*, meskipun pemaparan mengenai fokus tersebut kurang terperinci.

b. Paradigma prinsip-prinsip (1927-1937)

Paradigma ini dibentuk oleh Willoughby, Gullick, dan Urwick, yang terpengaruh oleh tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka menekankan prinsip-prinsip administrasi publik, yang diuraikan dalam POSDCORB dengan argumen prinsip-prinsip tersebut bersifat universal. Paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokusnya.

c. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Morstein Marx dan Herbert Simon memiliki pandangan berbeda mengenai pemisahan atau perbedaan antara politik dan administrasi. Marx meyakini sulit untuk memisahkan keduanya, sementara Simon berpendapat bahwa prinsip administrasi yang universal tidak selalu sesuai karena administrasi negara dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Paradigma ketiga ini cenderung memberikan

dominasi pada ilmu politik, sehingga administrasi publik hampir kehilangan identitasnya.

d. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Paradigma ini menyatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen diperdalam melalui pendekatan ilmiah. Fokus paradigma ini adalah pada analisis manajemen, perilaku organisasi, serta penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif dan sebagainya. Meskipun demikian, lokus dari paradigma keempat ini tidak terdefinisi dengan jelas.

e. Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-1990)

Paradigma ini memiliki fokus pada kebijakan publik, organisasi, dan manajemen. Sementara perhatiannya ditekankan pada masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

f. *Governance* (1990-Sekarang)

Secara umum, konsep ini tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat.

Berdasarkan paradigma administrasi publik yang dijelaskan maka penelitian ini termasuk paradigma keenam yaitu *governance*. Hal ini karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam menjalankan perannya yaitu mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* merupakan sasarannya dan pihak pemerintahnya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kerjasama juga terjalin antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dan pihak pengelola Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

1.5.4 Manajemen Publik

Sahya Anggara (2016: 542) dalam Prastiyono et al. (2021) mendefinisikan manajemen publik sebagai rangkaian kegiatan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Hal ini dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dengan fokus pada manajemen instansi pemerintah.

Overman menegaskan bahwa manajemen publik merupakan studi interdisipliner dari aspek-aspek umum suatu organisasi yang melibatkan gabungan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Menurut Ott, Hyde, dan Shafritz, manajemen publik dan kebijakan publik memiliki area tumpang tindih. Namun, untuk membedakannya, mereka menyatakan bahwa manajemen publik adalah proses menggerakkan sumber daya manusia (SDM) dan non-SDM sesuai dengan perintah dari kebijakan publik. (Pasolong, 2007)

1.5.5 Peran

Peran merujuk pada tindakan, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari individu atau posisi tertentu dalam suatu organisasi atau sistem sosial. Dalam administrasi publik, peran dapat mencakup peran pegawai negeri, pemimpin, organisasi, pemerintah, dan lainnya. Setiap individu dalam organisasi publik memiliki peran dan tanggung jawab spesifik. Manajemen publik melibatkan pengelolaan peran dan tanggung jawab individu dalam organisasi, termasuk pengaturan, pengawasan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan pelaksanaan peran

yang efektif. Peran individu ini merupakan komponen krusial dalam proses administrasi dan manajemen, karena melalui peran tersebut, tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai.

Menurut Poerwodarminta dalam Hartono dan Safitri (2019) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan tingkah laku yang diharapkan atau dimiliki oleh orang, atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Lebih lanjut, Levinson dalam Soekanto (2002: 200) menjelaskan peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Horoepetri, Arimbi dan Santosa (2008:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi, peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*distrust*) dan kerancuan (*biasess*).
- e. Peran sebagai terapi, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat

Menurut The Liang Gie (2004:44) peran adalah sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun secara praktis suatu aturan saling bergantung satu sama lain. Menurut Sarlito (2006), peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang dibebankan pada individu atau kelompok yang menduduki posisi sosial tertentu.

Menurut Suhardono (1994:14) peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran yang terjadi apabila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya. Lebih lanjut, Suhardono (2011:10), mengatakan bahwa sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya merujuk pada perilaku yang mengandung keharusan (*oughtness, shouldness*) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (*convent*) disebut sebagai norma, sedangkan yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (*demand*).

Menurut Soekanto (2007:213) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan perannya. Baik peran maupun kedudukan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Lebih lanjut, menurut Soekanto (2002: 242) peran dibagi menjadi 3 yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.

- a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya;
- b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri; sedangkan
- c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224) menjelaskan bahwa peran adalah sekumpulan formulasi yang mengatur perilaku yang diharapkan dari individu dengan posisi tertentu (Hia, 2019).

Menurut Soraya (2017: 11), peran juga merupakan suatu kedudukan hukum yang meliputi tugas, fungsi, dan kewenangan aparaturnya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

- a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran Ideal adalah peran yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

- c. Peran Faktual adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Lebih lanjut, Soraya mengemukakan bahwa peran suatu lembaga berkaitan dengan pelaksana tugas, dan fungsi, seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dituntaskan seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya masing-masing. Fungsi sebuah lembaga atau institusi disusun berdasarkan pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

1.5.6 Peran Pemerintah

Menurut Muhtar Haboddin (dalam Alfianto dan Fauzi, 2021:7), peran pemerintah merujuk pada semua aktivitas yang terkoordinasi, bersumber pada kedaulatan, dan didasarkan pada landasan negara yang terkait dengan rakyat dan wilayah negara untuk mencapai tujuan negara. (Ayuningtyas et al., 2023) Menurut Ryass Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010:32) peran pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah

memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- b. Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.
- c. Peran pemerintah sebagai motivator adalah upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam kegiatan apapun sehingga berdampak pada tingkat pengetahuan yang dimana masyarakat mampu memahami program-program yang akan ataupun sudah terlaksana sehingga peran pemerintah sebagai motivator dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000) yaitu pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi,

proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan perannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan

dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Peran pemerintah yang dimaksud oleh Yusuf (2014) yaitu:

- a. Pemerintah sebagai regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan.
- b. Pemerintah sebagai dinamisator yaitu membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan menggunakan pemberian bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan menggunakan tim penyuluhan ataupun badan tertentu agar diberikan pelatihan.
- c. Pemerintah sebagai fasilitator yakni memberikan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bertugas pada

bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pada bidang pendanaan atau permodalan pada masyarakat yang diberikan pemberdayaan.

Dengan merujuk pada berbagai pendapat mengenai peran pemerintah tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah melibatkan seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang berada dalam lembaga, organisasi, atau komunitas di tengah masyarakat. Tugas dan fungsi ini terkait erat dengan hukum publik, kemampuan untuk menjalankan hak dan tanggung jawab, serta memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan hubungan-hubungan hukum.

Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008: 558- 613) mengidentifikasi beberapa indikator peran yang harus dimiliki oleh kelompok atau individu dalam sebuah organisasi. Fokusnya adalah pada peran pemerintah sebagai pekerja masyarakat, yang melibatkan empat peran kunci: peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis. (Cahyani et al., 2021)

- a. Peran Fasilitatif: Diperuntukkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, dan menghargai kontribusi individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan produktivitas.
- b. Peran Edukasi: Terlibat dalam menyusun agenda, tidak hanya membantu pelaksanaan peningkatan produktivitas, tetapi juga aktif memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu serta kelompok masyarakat.

- c. Peran Representasional: Melibatkan interaksi dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Tujuannya adalah mendapatkan dukungan luas, membuka jaringan, mengembangkan hubungan, dan mendorong partisipasi dalam mengembangkan potensi.
- d. Peran Teknis: Menyangkut kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan teknologi informasi, membuat presentasi, mengelola keuangan, dan melakukan penilaian kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan orang, kelompok, dan komunitas.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, yang dimaksud dengan peran pemerintah dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sebagai sebuah lembaga yang memiliki bagian penting dalam situasi pengembangan kegiatan kepariwisataan yang sedang berlangsung maupun kondisi kepariwisataan tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Dalam menjalankan perannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Dalam menjalankan perannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis.

1.5.7 Pariwisata

Pariwisata menurut Spillane (1987: 20) adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai

usaha mencari keseimbangan/keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Sedangkan Pendit (2003: 20), mendefinisikan Pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gayatri (2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Prayogo (2018) Pariwisata secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain membuat rencana dalam jangka waktu tertentu, untuk tujuan rekreasi dan mendapatkan hiburan sehingga keinginannya terpenuhi.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pariwisata, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah aktivitas perjalanan sementara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan untuk mencari keseimbangan, keserasian, kebahagiaan, dan pengalaman baru dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, alam, dan ilmu pengetahuan.

1.5.8 Jenis-jenis Pariwisata

Suwena & Widyatmaja (2010) dalam bukunya yang berjudul “Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata” menyebutkan jenis-jenis pariwisata sebagai berikut:

- a. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:
 1. Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kota Denpasar dan kota Bandung.
 2. Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
 3. Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.

4. Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.
 5. Pariwisata internasional (*International tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.
- b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, pariwisata dibedakan menjadi:
1. Pariwisata aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
 2. Pariwisata pasif (*out-going tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri.
- c. Menurut alasan/tujuan perjalanan, pariwisata dibedakan menjadi:
1. *Business tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain.

2. *Vacational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain.
 3. *Educational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya: darmawisata (*study tour*).
 4. *Familiarization tourism* yaitu suatu perjalanan anjungsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.
 5. *Scientific tourism* yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
 6. *Special Mission tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olahraga, maupun misi lainnya.
 7. *Hunting tourism* yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.
- d. Menurut saat atau waktu berkunjung, pariwisata dibedakan menjadi:
1. *Seasonal tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Contoh: *Summer tourism*, *winter tourism*, dan lain-lain.

2. *Occasional tourism* yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu *event*. Misalnya Sekaten di Yogyakarta, Nyepi di Bali, dan lain-lain.
- e. Menurut objeknya, pariwisata dibedakan menjadi:
1. *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
 2. *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
 3. *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
 4. *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
 5. *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
 6. *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, picnic, dan lain-lain.

7. *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.
 8. *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- f. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan, pariwisata dibedakan menjadi:
1. *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
 2. *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 3. *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau *tour operator/travel agent*.
- g. Menurut alat pengangkutan yang digunakan, pariwisata dibedakan menjadi:
1. *Land tourism* yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan transportasi darat, seperti bus, taxi, dan kereta api.
 2. *Sea tourism* yaitu kegiatan kepariwisataan yang menggunakan angkutan laut untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.

3. *Air tourism* yaitu jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara dari dan ke daerah tujuan wisata.
- h. Menurut umur yang melakukan perjalanan, pariwisata dibedakan menjadi:
1. *Youth tourism* yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan wisata dengan harga relatif murah.
 2. *Abdult tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya orang yang melakukan perjalanan adalah para pensiunan.
- i. Menurut jenis kelamin, pariwisata dibedakan menjadi:
1. *Masculine tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya diikuti oleh kaum pria saja, seperti safari, *hunting*, dan *adventure*.
 2. *Feminime tourism* yaitu jenis pariwisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita saja, seperti rombongan untuk menyaksikan demonstrasi memasak.
- j. Menurut harga dan tingkat sosial, pariwisata dibedakan menjadi:
1. *Delux tourism* yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel, maupun atraksinya.
 2. *Middle class tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayanannya.
 3. *Social tourism* yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas cukup memadai selama dalam perjalanan.

k. Berdasarkan pengembangannya yang bersifat keberlanjutan, pariwisata dibedakan menjadi:

1. Ekowisata (*Ecotourism*) yaitu perjalanan wisata yang secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan wisatawan untuk menghargai dan mencintai alam serta budaya lokal, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para wisatawan untuk turut memelihara kelestarian alam.
2. Agrowisata (*Agrotourism*) yaitu perjalanan wisata yang berlokasi atau berada di kawasan pertanian secara umum, lebih dikhususkan pada areal hortikultura.
3. Wisata Alam (*Natural Tourist Attraction*) yaitu suatu bentuk rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia.

1.5.9 Ekowisata

Ekowisata merupakan jenis pariwisata yang didasarkan pada keberlanjutan lingkungan, melibatkan pendidikan, serta interpretasi tentang alam, budaya, dan komunitas lokal. Ekowisata bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekologis, menghargai keragaman hayati, dan mempromosikan kehidupan berkelanjutan (Black, 1999).

Ekowisata secara konseptual adalah pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Sementara itu, ditinjau

dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Isa Wahyudi, 2019).

Ekowisata juga didefinisikan sebagai suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Hal ini merupakan kesatuan konsep yang terintegratif secara konseptual tentang keseimbangan antara menikmati keindahan alam dan upaya mempertahankannya. Sehingga pengertian ekowisata dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. (Dias Satria, 2009).

Ekowisata diperkenalkan pada awalnya oleh Hector Ceballos & Lascurain (1987) dimana mereka mengemukakan bahwa wisata alam atau pariwisata ekologi melibatkan perjalanan ke tempat-tempat alami yang masih terjaga dan minim gangguan manusia atau polusi, dengan maksud untuk belajar, menghargai, dan menikmati keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna, serta aspek budaya dari masyarakat, baik yang terkait dengan masa lalu maupun masa kini. Ekowisata merupakan bentuk wisata alam yang berfokus pada upaya mengurangi dampak negatif, menjaga kelestarian spesies dan habitat alam, serta berperan dalam upaya

pelestarian lingkungan, sambil memberikan manfaat ekonomi yang tidak langsung kepada masyarakat setempat (Goodwin, 1997).

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai ekowisata, maka dapat disimpulkan bahwa ekowisata adalah bentuk pariwisata yang berpusat pada keberlanjutan lingkungan, edukasi, dan pemahaman tentang alam, budaya, serta komunitas lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan ekosistem, menghormati keanekaragaman hayati, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di alam, ekowisata berupaya menjaga keseimbangan antara keindahan alam dan upaya pelestariannya, sambil memberikan manfaat ekonomi tidak langsung kepada masyarakat setempat.

1.5.10 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata didefinisikan sebagai upaya yang berupa rangkaian terpadu untuk mewujudkan penggunaan sumber daya industri pariwisata dan mewujudkannya di segala aspek usaha baik secara langsung atau tidak dalam pengembangan pariwisata (Swarbrooke, 2000).

Menurut Yoeti dalam Suwarti dan Yuliamir (2017) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu produk atau menambah jenis produk wisata tersebut. Pengembangan suatu pariwisata sangat diperlukannya sebuah perencanaan. Hal ini bertujuan agar pengembangan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana di awal dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Alasan utama dilakukannya

sebuah pengembangan pariwisata ini untuk meningkatkan perekonomian daerah atau negara tersebut (Santi, 2010).

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengembangan pariwisata, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata adalah serangkaian upaya terpadu untuk memanfaatkan sumber daya pariwisata dengan peningkatan produk wisata dan perencanaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian suatu daerah atau negara.

Menurut Yoeti (2006), dalam pengembangan sebuah pariwisata itu terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Keberlangsungan ekologi artinya suatu pengembangan dalam pariwisata dapat menjamin pemeliharaan terhadap wisata tersebut.
- b. Keberlangsungan kehidupan dan budaya artinya dengan adanya pengembangan pariwisata membuat peningkatan peran masyarakat dalam kehidupan dan budaya sehari-hari.
- c. Keberlangsungan ekonomi artinya suatu pengembangan pariwisata yang menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi.
- d. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat artinya memberi wadah kepada mereka untuk mengembangkan pariwisata di daerah tersebut.

1.5.11 Pengembangan Ekowisata

Menurut Abdoellah et al. (2020), pengembangan ekowisata merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi,

pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan terhadap lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan finansial yang didapat dari biaya perjalanan wisata digunakan juga untuk kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan penduduk lokal.

Menurut Qomariyah (2017), pengembangan ekowisata adalah upaya untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan pelestarian alam, budaya, dan masyarakat setempat. Ekowisata bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap keanekaragaman hayati dan budaya, sambil menyediakan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal dan melestarikan lingkungan. (Angela, 2023)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas mengenai pengembangan ekowisata, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekowisata adalah proses terencana yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan produk pariwisata dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan ekowisata melibatkan upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek ekologi dan keberlanjutan ke dalam pengelolaan destinasi pariwisata, dengan tujuan menciptakan pengalaman wisata yang ramah lingkungan, ekonomis, dan sosial. Dalam pengembangan ekowisata, penting untuk memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam serta mempromosikan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan Ekowisata antara lain (Eplerwood, 1999):

- a. Mencegah dan menanggulangi dampak
- b. Edukasi mengenai konservasi lingkungan
- c. Memberikan manfaat ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh kawasan tersebut
- d. Adanya partisipasi dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan
- e. Pendapatan untuk masyarakat lokal
- f. Memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan alam
- g. Daya dukung atau kemampuan lingkungan untuk menopang kegiatan tertentu
- h. Berpotensi menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara

Sedangkan menurut (Page & Dowling, 2002), terdapat tiga prinsip-prinsip utama ekowisata yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip Konservasi, berarti memiliki kesadaran, responsibilitas, dan dedikasi untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya, serta melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan. Prinsip konservasi alam memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta pembangunan yang mengikuti kaidah ekologi, sedangkan prinsip konservasi budaya adalah kepekaan dan penghormatan kepada nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
- b. Prinsip Partisipasi Masyarakat, masyarakat lokal harus secara maksimal terlibat dalam tahapan perencanaan dan pengembangan ekowisata.

- c. Prinsip Ekonomi, pengembangan ekowisata bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, sehingga pemanfaatannya dapat berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan bagi generasi masa depan. Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata atau wisata terbatas yang memanfaatkan tatanan, nilai dan fungsi ekologi sebagai obyek dan tujuan kepariwisataan.

Berdasarkan prinsip dalam ekowisata tersebut, maka tidak semua jenis kegiatan wisata alam dapat dikatakan sebagai kegiatan ekowisata atau tidak. Oleh karena itu digunakan tolok ukur bagi penentuan kegiatan yang termasuk sebagai ekowisata, maka ekowisata harus didasarkan pada kriteria (Indecon, 1996: 12):

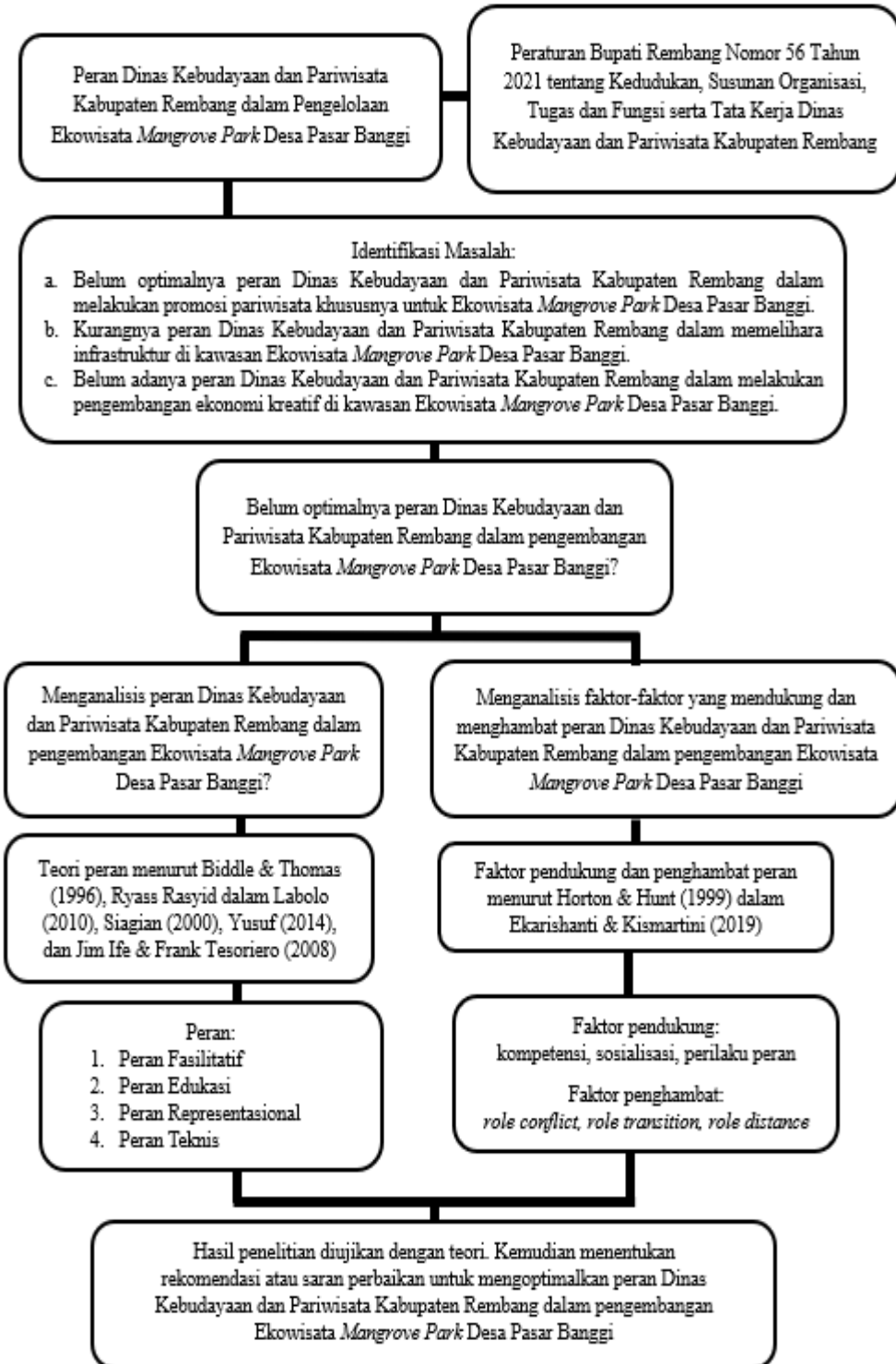
- a. Pengembangan pariwisata, khususnya ekowisata harus didasarkan atas konsultasi dan persetujuan penduduk setempat.
- b. Sebagian keuntungan yang layak dari perkembangan pariwisata harus dikembalikan kepada penduduk setempat.
- c. Perkembangan pariwisata harus didasarkan atas prinsip ekologi yang sehat dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya serta tradisi keagamaan yang dianut penduduk setempat.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Sedangkan Pengembangan ekowisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.

Ekowisata di daerah terbagi menjadi beberapa jenis sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata, yaitu ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan; dan/atau ekowisata karst. Lebih lanjut, tiap-tiap jenis ekowisata ini harus dapat terus dikembangkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata pada Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata.
- b. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata.
- c. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
- d. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
- e. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.
- f. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan.
- g. Menampung kearifan lokal.

1.5.12 Kerangka Berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang merupakan sikap atau tindakan yang diharapkan sebagai sebuah lembaga yang memiliki bagian penting dalam situasi pengembangan kegiatan kepariwisataan yang sedang berlangsung maupun kondisi kepariwisataan tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan ekowisata *Mangrove Park*. Peneliti akan melihat bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menjalankan perannya dalam pengembangan ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Untuk mengetahui peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi, peneliti menggunakan empat peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya sebagai berikut:

1. Peran Fasilitatif

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang diperlukan dalam rangka memfasilitasi, memperkuat, mengakui eksistensi dari Ekowisata *Mangrove Park* di Desa Pasar Banggi. Dalam hal ini, meliputi:

- a. Memfasilitasi perizinan pariwisata.
- b. Meningkatkan fasilitas dan daya tarik Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.
- c. Mengorganisir kegiatan promosi dan memberikan penghargaan terhadap keunggulan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

2. Peran Edukasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berperan dalam memperluas pengetahuan, keterampilan dan pengalaman individu dan kelompok masyarakat. Dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki peran dalam memberdayakan pengelola dan masyarakat setempat, meliputi:

- a. Mendorong peningkatan keterampilan pengelola Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.
- b. Mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

3. Peran Representasional

Pada peran representasional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berperan sebagai perwakilan yang membawa kepentingan masyarakat kepada publik khususnya dalam sektor pariwisata. Dalam rangka pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi, hal ini berarti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berupaya untuk membangun jaringan kerja yang lebih luas bersama pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini, peneliti mengamati poin-poin pada peran ini meliputi:

- a. Menginisiasi kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.
- b. Menyusun rencana strategis bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

4. Peran Teknis

Peran ini merujuk pada kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data seputar perkembangan urusan pariwisata daerah khususnya di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Data yang ditemukan di lapangan kemudian diolah menggunakan komputer. Peran teknis yang dilihat oleh peneliti meliputi bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberjalanan kegiatan pariwisata di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Selain beberapa peran di atas, peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan akan menggali terkait hal apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Kemudian peneliti akan mengidentifikasi bagaimana temuan tersebut dapat mendukung atau menghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Faktor pendukung peran menurut Horton & Hunt (1999) dalam Ekarishanti & Kismartini (2019) antara lain:

1. Kompetensi, diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan peran pada sejumlah perilaku yang saling berkaitan

2. Sosialisasi, merupakan proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat, sebagian besar adalah proses mempelajari perilaku peran.
3. Perilaku peran, diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka untuk perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Sedangkan untuk faktor yang dapat menghambat peran (*role strain*) antara lain:

1. *Role conflict*, konflik yang terjadi pada peran setidaknya ada dua macam, yaitu konflik antara berbagai peran dan konflik dalam satu peran tunggal.
2. *Role transition*, merupakan masa perubahan dari satu peran ke peran yang lain dan perlu kesiapan peran karena pengalaman belajar dari satu status tidak dapat memberikan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengisi peran berikutnya yang diharapkan akan dipangku seseorang.
3. *Role distance*, yaitu kesenjangan peran yang terjadi apabila seseorang merasakan ketidakcocokan dalam menjalankan peran yang biasanya menimbulkan menimbulkan perasaan tertekan

1.7 Argumen Penelitian

Pengelolaan sumber daya alam di daerah merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah tentunya menjadi *leading sector* dalam upaya pengelolaan tersebut agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di daerah. Dalam pengembangan Ekowisata

Mangrove Park di Desa Pasar Banggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memegang peran penting sebagai instansi yang bergerak langsung di bidang kepariwisataan daerah. Alasan peneliti mengambil topik ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mengembangkan salah satu objek wisata daerah di Kabupaten Rembang yaitu Ekowisata *Mangrove Park* di Desa Pasar Banggi.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yang dapat ditentukan dari peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya, yaitu meliputi peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* di Desa Pasar Banggi meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan evaluasi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan pariwisata daerah di masa yang akan datang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan mendapatkan dan menjelaskan gambaran rinci tentang objek penelitian atau

keadaan yang sedang diamati. Menurut Sugiyono (2013: 205) dalam penelitian kualitatif, "masalah" yang dihadapi peneliti masih belum sepenuhnya terungkap, bahkan dapat dikatakan kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, "masalah" dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, bersifat tentatif, dan mungkin akan mengalami perkembangan atau perubahan setelah peneliti terjun ke lapangan. Pemilihan metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data berupa deskripsi verbal dan perilaku dari individu yang diamati, memungkinkan penelitian untuk menyelami dengan lebih mendalam peristiwa atau kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan meneliti peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dan lokasi Ekowisata *Mangrove Park* di Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan dapat memberikan informasi yang nyata dan dapat dipercaya. Informan penelitian adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dengan

fenomena yang sedang diteliti. Pemilihan informan tidak hanya didasarkan pada kehadiran mereka, tetapi juga dilihat dari kompetensi dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Metode penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yang memilih informan berdasarkan karakteristik atau kualitas tertentu, sambil mengabaikan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sugiyono (2013: 85) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
- b. Sub Koordinator Informasi dan Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
- c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
- d. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
- e. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
- f. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pembinaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
- g. Ketua Kelompok Tani Sido Dadi Maju sekaligus Ketua Pengelola Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.
- h. Penasehat Kelompok Tani Sido Dadi Maju.

i. Ketua Kelompok Wanita Tani Dukuh Kaliuntu, Desa Pasar Banggi.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang berarti data yang digunakan terdiri dari kalimat informatif, tulisan, atau pemaparan fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data melibatkan jawaban dari wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini mencakup jawaban informan terkait peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, publikasi, bahan bacaan internet, dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang diambil oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Sugiyono (2013: 225) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam situasi alamiah (*natural setting*), menggunakan sumber data primer, dan lebih banyak menggunakan teknik observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2013: 245-246) menyatakan bahwa analisis dimulai sejak merumuskan masalah sebelum lapangan dan berlanjut hingga penulisan hasil penelitian. Analisis data dilakukan sepanjang pengumpulan data, bahkan saat wawancara, peneliti sudah menganalisis jawaban yang diperoleh. Jika jawaban belum memuaskan, peneliti akan terus melakukan pertanyaan untuk memperoleh data yang dianggap kredibel. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menyajikan data secara mudah dipahami.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber sebagai metode pengujian kualitas data. Metode ini bertujuan untuk memastikan pemahaman peneliti terhadap proses dan hasil penelitian berdasarkan informasi dari informan. Penggunaan metode triangulasi sumber melibatkan berbagai sumber data yang sama atau sejenis untuk meningkatkan kepercayaan pada data yang diperoleh. Beberapa cara yang digunakan dalam metode triangulasi sumber mencakup wawancara komprehensif dengan informan, pengujian silang antara fakta dari informan dengan fakta lapangan, dan pembuktian fakta dari informan dengan pihak lain.